

BAB 2

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting sekaligus langkah awal dalam sebuah penelitian. Proses penulisan kajian pustaka akan dilakukan sejak peneliti mulai memikirkan masalah apa yang akan diteliti disertai pencarian referensi yang relevan dengan topik penelitian. Istilah lain yang sering digunakan dalam penamaan kajian teori adalah landasan teori, tinjauan pustaka, atau studi kepustakaan. Jainuri (Setyosari, 2012: 84) menjelaskan definisi kajian teori secara umum “. . . kajian teori atau kajian pustaka adalah bahasan atau bahan-bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik atau temuan dalam penelitian”. Berikut beberapa teori yang digunakan sebagai landasan penelitian:

2.1.1 Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)

Berdasarkan UU RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 1 Ayat 1 menerangkan bahwa

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Teori umum yang digunakan penulis sebagai pedoman atau acuan bagi kajian teori selanjutnya adalah teori pers. Terdapat empat teori pers yang sering digunakan di dunia yaitu teori pers otoritarian, teori pers libertarian, teori pers tanggung jawab sosial, dan teori pers Soviet Komunis. Teori pers yang paling relevan dengan topik penelitian adalah teori pers tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

Teori tanggung jawab sosial (*social responsibility*) mulai muncul pada abad ke-20 di Amerika Serikat tahun 1947 sebagai bentuk pemberontakan pada teori sebelumnya yaitu teori pers libertarian.

Setyani (Rachmadi, 1990: 34-35) menyatakan “Kebebasan pers dalam teori Liberal adalah bahwa pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia mencari kebenaran”. Kebebasan tersebut mengakibatkan sedikit sekali kontrol pemerintah dalam informasi serta hiburan yang dimuat oleh pers. Penyalahgunaan teori pers libertarian inilah yang memicu munculnya teori baru yakni teori pers tanggung jawab sosial sebagai revisi atas tindakan salah kaprah yang dilakukan oleh penganut teori libertarian.

Teori pers tanggung jawab sosial meyakini bahwa kebebasan pers mengandung sebuah tanggung jawab yang cukup berat untuk mendidik serta memajukan masyarakat. Permana (2005: 275) menyatakan

Jurnalisme bertanggung jawab tidak memperkuat pemerintahan dalam kekuasaannya, juga tidak berusaha serupa dalam memperkuat hak individu untuk berpublikasi dan mendapatkan keuntungan. Pers harus tetap bebas dari pemerintah dan tekanan bisnis. Pers harus melayani masyarakat. Pemberitaan tanggung jawab sosial di definisikan oleh kewajiban pemberitaan itu sendiri pada masyarakat (Christians: 2004).

Masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar sehingga opini, etika, hingga kepuasan merekalah yang dijadikan tolak ukur kinerja pers. Pers memiliki kewajiban untuk menyampaikan berita yang bersifat informatif, benar, akurat, objektif, serta mempunyai komposisi yang seimbang dan proporsional.

Ghassani dan Sukowati (2016: 175) menulis sebuah jurnal PUBLISIA yang menyatakan bahwa

Dasar pemikiran utama dari teori ini ialah bahwa, kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan dan pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsinya.

Ketidakpuasan masyarakat akan melencengnya sistem pers yang menganut teori libertarian diperparah ketika pers menjadi berorientasi profit yang mengutamakan penjualan dan iklan dibandingkan kebutuhan publik akan informasi yang akurat dan terpercaya.

Permana (2005: 273) mengatakan beberapa hal yang menyebabkan para pelaku atau oknum tertentu memaknai kebebasan pers dengan salah kaprah yaitu

Faktor itu adalah dampak dari globalisasi, pengadopsian sistem pasar, dan tidak adanya rujukan bagi insan pers, masyarakat, dan pemerintah dalam konsep dan pelaksanaan pers bebas dan bertanggungjawab.

Teori pers tanggung jawab sosial diharapkan mampu menekan laju kebebasan pers yang kian menyimpang seiring melesatnya arus globalisasi dan bergesarnya nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sebagai bagian dari imperialisme kebudayaan.

2.1.2 Pers di Kota Tasikmalaya

“Pers dalam pengertian sempit, hanya di golongankan produk-produk penerbitan yang melalui proses percetakan seperti majalah, surat kabar” Setyani (Rachmadi, 1990: 9-10). Pertumbuhan dan perkembangan pers berjalan sejalan dengan ekspansi yang dilakukan kolonial Hindia Belanda. Akla (Adam, 2003: 2) menyatakan bahwa

. . . berawal dari kedatangan bangsa tersebut di Nusantara. Kongsi dagang *Verenigde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost Indische Compagne* (VOC) menyadari bahwa pers berguna untuk mencetak aturan hukum yang termuat dalam maklumat resmi pemerintah, sejak itulah sejarah pers di Indonesia berkembang.

Pers sebagai lembaga sosial sekaligus media massa memiliki kekuatan raksasa dalam mengendalikan para penguasa otoriter maupun kolonial. Pengaruhnya yang berdampak besar seringkali menjadikan pers sebagai alat perjuangan.

Perkembangan pers dan gerakan kebangsaan meluas hingga ke berbagai pelosok kota yang ada di Indonesia khususnya kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Semarang dan lain-lain. Rufaidah dan Purwanto (2004: 525) mengatakan

Setelah Bandung ditetapkan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai *gemeente* pada tahun 1906, di tambah peran sebagai ibukota Keresidenan Priangan sejak tahun 1864, maka Bandung berkembang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kota lain di Priangan.

Pada abad ke-18, kolonial Belanda telah memperkenalkan sistem penerbitan di Indonesia. Di umumkannya undang-undang pers pada tahun 1856 adalah pemicu masuknya dunia percetakan ke Indonesia di iringi munculnya berbagai surat kabar berbahasa anak negeri seperti “*Medan Priyayi*” yang merupakan surat kabar Nasional pertama di bawah pimpinan R. M. Tirta Adisuryo. Sebelumnya penguasa kolonial sangat mengekang pertumbuhan pers dan menganut sistem pers otoriter. Hutagalung (Surjomihardjo, 2002: 25-31) menulis sebuah jurnal yang berjudul *Dinamika Sistem Pers di Indonesia*, dalam jurnal tersebut termaktub demikian

. . . perkembangan pers di masa penjajahan sejak pertengahan abad ke 19 ternyata telah dapat menggugah cendekiawan Indonesia untuk menyerap budaya pers dan memanfaatkan media cetak sebagai sarana membangkitkan dan menggerakkan kesadaran bangsa.

Pers dan gerakan politik memiliki hubungan yang saling terkait. Pada awal abad ke-20 lahir organisasi pergerakan kebangsaan sebagai dampak dari kebijakan politik etis di Hindia Belanda. Poesponegoro *et al.* (2008: 24) mengatakan

Politik etis mengubah pandangan dalam politik kolonial yang beranggapan Indonesia tidak lagi sebagai *wingewest* (daerah yang menguntungkan) menjadi daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat dipenuhi keperluannya, dan ditingkatkan budaya rakyat pribumi.

Politik etis melahirkan kaum terpelajar yang turut aktif dalam organisasi pergerakan kebangsaan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, *Indische Partij*, PNI, dan sebagainya. Pers dan organisasi kebangsaan tersebut menjadi suatu gerakan politik sebagai bentuk perlawanan kepada sistem kolonial Belanda. Akla (Adam, 2003: xxiii-xxiv) mengatakan

. . . perkembangan intelektual ini pada gilirannya merangsang orang Indonesia mendirikan pers sendiri serta membangun organisasi sosial-ekonomi, keagamaan dan politik.

Pergerakan nasional tidak hanya berkobar di kota-kota besar. Rasa nasionalisme tidak hanya melekat pada tokoh-tokoh papan atas yang

menjadi pelopor organisasi-organisasi ternama di Indonesia. Pergerakan nasional yang terjadi dalam lingkup lokal jarang sekali mendapatkan perhatian dan di angkat ke permukaan, padahal pergerakan nasional tersebut juga menggema hingga ke kota-kota kecil seperti Tasikmalaya. Falah (2012: 117) mengatakan

. . . kadang-kadang kita terjebak tatkala membicarakan pergerakan nasional, pikiran kita tertuju pada sebuah atau mungkin lebih organisasi modern yang berorientasi nasional. Acap kali suara-suara para penggerak nasionalisme yang hanya terdengar pada tingkat lokal, luput dari perhatian kita.

Organisasi pergerakan kebangsaan yang paling berpengaruh di Tasikmalaya adalah Sarekat Islam dan Paguyuban Pasundan. Kota Tasikmalaya setidaknya telah dikenal dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1820 seiring dengan pembentukan *District Tassikmalaija op Tjitjariang*. Falah (Hardjasaputra dalam Sjafrudin *et al.*, 1993: 263) mengatakan “. . . dalam *verslag* itu justru terdapat dua distrik yang sekarang menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Kota Tasikmalaya, yaitu Distrik Indihiang dan Distrik Cicariang”. Sejak tanggal 24 Juli 1871, berbagai macam aktivitas di Kota Tasikmalaya mulai mencuat dan diberitakan oleh koran-koran Belanda seperti *Java-bode: nieuws, handels-en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie* yang mengulas berita mengenai akan di dirikannya sekolah pribumi di Tasikmalaya. Lembaga Riset Sejarah Sosial dan Kebudayaan Tasikmalaya, Soekapoera (2017) menyatakan bahwa

Diantara nama-nama koran Belanda yang aktif memberitakan berbagai peristiwa di Tasikmalaya sampai dengan tahun 1940-an adalah *De Soematra Post*; *Java-bode: nieuws, handels-en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie*; *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*; *Batavia Nieuwsblad*; *Algemeen Handelsblad*; *De Locomotife*; *De Indische courant*; *Het Vaderland: staat-en letterkundig nieuwsblad*; *Nieuwe Rotterdamsche Courant*; *De Gooi-en Eemlander: nieuws-en advertentieblad*; *Het volksdagblad: dagblad voor Nederland*; *de Preanger Bode*; *De tribune: soc. dem. Weekblad*; dan banyak koran lainnya.

Sejak tahun 1925, masyarakat Tasikmalaya telah mengenal banyak sekali produk pers cetak berupa koran dan majalah. Pada masa tersebut, masyarakat kelas atas maupun kelas bawah yang rutin berlangganan koran atau majalah menjadi simbol dari kaum yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk maju. Karya jurnalistik telah berhasil menjadi penopang kebangkitan dan kemajuan rakyat pribumi. Falah (2012: 116) mengatakan

Sampai pertengahan abad ke-20, dinamika masyarakat Kota Tasikmalaya ditandai dengan maraknya penerbitan berbagai surat kabar dan majalah yang dikategorikan sebagai pers Indonesia.

Tahun 1911 mulai muncul kesadaran Kesundaan di kalangan menak kelas menengah ditandai dengan terbitnya media massa berbahasa Sunda pertama yaitu *Tjahaja Pasoendan* di Cianjur Jawa Barat. Fenomena kesadaran Kesundaan juga ditandai oleh berdirinya *Paguyuban Pasundan* sebagai bagian dari rekam jejak himpunan paling besar sepanjang sejarah Indonesia yakni Sarekat Islam (SI) yang sama-sama mengusung visi dan misi organisasinya melalui media massa.

Masalah utama yang sering di hadapi oleh para redaktur surat kabar yang hendak memulai berkecimpung di dunia jurnalistik adalah modal. Modal biasanya diperoleh dengan cara pinjam-meminjam. Rahim Asyik (*Pikiran Rakyat*, 3 Februari 2015) mengatakan bahwa “. . . Sipatahoenan di terbitkan dengan uang pinjaman dari *schoolfonds* (dana beasiswa) Pasundan”. Pengusaha dalam bidang percetakan dan penerbitan yang paling terkenal di Tasikmalaya adalah Haji Sobari, pemilik dari *Galunggung Drukkerij*. Soekapoera (2017) menjelaskan

Haji Sobari diketahui mempunyai hubungan dekat dengan tokoh-tokoh gerakan Islam, terutama dengan kalangan Tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah. Pada akhir 1930-an, dia telah mempunyai cabang percetakan di kota Bandung. Hampir semua media massa yang terbit di kota Tasikmalaya di cetak di percetakan miliknya.

Koran Sipatahoenan menjadi simbol kebangkitan pers berbahasa Sunda di Tasikmalaya. Terbitnya koran tersebut memicu lahirnya puluhan surat kabar yang menjadikan pertumbuhan dan perkembangan

pers di Tasikmalaya tidak tertandingi oleh daerah lainnya di Tatar Priangan.

2.1.3 Majalah Al-Moechtar sebagai Media Dakwah Islam

Surat kabar memiliki peran penting dalam penyampaian berita atau informasi baik umum maupun mengenai keislaman. Nasriah (2012: 164) menjelaskan fungsi surat kabar sebagai media dakwah menurut Syafaat Habib “. . . adalah membentuk opini, merubah sikap dan untuk mengarahkan tingkah laku perseorangan dan masyarakat”. Kemunculan surat kabar tidak lepas dari sepak terjang kaum terpelajar yang mulai menolak sistem penjajahan sehingga muncul sebuah gerakan nasionalisme.

Gerakan nasionalisme tidak hanya tentang mereka yang berjuang dalam organisasi tetapi juga melalui pers yang berkembang tidak merata di setiap kota di Indonesia. Noorikhsan (Hans Kohn, 1984: 11) menjelaskan definisi nasionalisme dari sudut pandang politik adalah

. . . paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus di serahkan kepada Negara bangsa, yaitu suatu Negara yang penduduknya memiliki hak dan kewajiban sama serta mau mengikatkan dirinya dalam suatu Negara.

Awal abad ke-20, Priangan tidak hanya disibukkan oleh kemunculan berbagai macam organisasi keagamaan, tetapi juga ditandai oleh kebangkitan kesadaran sosial dan politik regional dengan meningkatnya sirkulasi penerbitan majalah Islam berbahasa Sunda. Hutagalung (2013: 55) mengatakan

. . . terjadilah pembauran antara pengasuh pers dan masyarakat yang mulai terorganisasi dalam klub-klub studi, lembaga-lembaga sosial, badan-badan kebudayaan, bahkan gerakan-gerakan politik. Wartawan menjadi tokoh pergerakan atau sebaliknya tokoh pergerakan menerbitkan pers.

Surat kabar sebagai media massa sekaligus media dakwah memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penyiaran agama Islam di masyarakat. Informasi yang di sajikan oleh pers menjadi sebuah konsumsi sehari-hari

yang tidak dapat di tampikan begitu saja. Nasriah (2012: 162) menyebutkan

Surat kabar memiliki kekuatan raksasa dalam mempengaruhi dan menggerakkan massa. Menggunakan surat kabar sebagai penyampai pesan dakwah akan mampu meningkatkan harga diri menumbuhkan rangsangan yang baik dan dapat meningkatkan nilai-nilai artistik masyarakat.

Mengingat etnis Sunda merupakan etnis terbesar kedua di Indonesia sehingga respon atas majalah Islam Sunda yang dipelopori oleh para kiai atau ajengan tersebut disambut baik oleh masyarakat. Noorikhsan (2016: 54) menjelaskan bahwa

Dalam masyarakat Islam di Indonesia, sosok kyai atau ajengan (sunda) merupakan lambang kewahyuan. Karena kemampuannya dalam menjelaskan masalah teologi yang sulit kepada para petani muslim sesuai dengan pandangan atau suara hati mereka. Istilah ini acap kali di sandingkan dengan kata ulama. Meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam struktur sosial.

Terdapat banyak sekali persaingan antara muslim modernis dan muslim tradisional dalam hal ideologi, namun munculnya berbagai majalah Islam Sunda menunjukkan upaya membangun identitas Islam yang sama, yakni guna meningkatkan kesadaran masyarakat Sunda untuk menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidupnya sehari-hari.

Media massa berbahasa Sunda yang pertama kali terbit adalah *Thahaja Pasoendan*. Surat kabar tersebut diterbitkan di Cianjur pada tahun 1911 yang dikelola oleh R. Koesoema Soedjana dan R. Soetisna Sendjaja. Beberapa tahun kemudian beliau juga merintis koran berbahasa Sunda bernama *Sipatahoenan*. Rahim Asyik (*Pikiran Rakyat*, 3 Februari 2015) mengatakan bahwa “. . . Benar saja, Soetisna Sendjaja akhirnya menjadi bidan bagi lahirnya *Sipatahoenan* yang usulannya datang dari Bandung itu”.

Rentang waktu penerbitan pers Islam berbahasa Sunda dimulai sejak tahun 1920 hingga tahun 1950-an. Kurnia (2018) menulis sebuah berita berjudul *Melacak Media Islam Berbahasa Sunda* dalam portal *Pikiran Rakyat* sebagai berikut

Media yang diterbitkan pada tahun 1920-an, majalah yang berhasil terbit diantaranya adalah Bala Tentara Islam (1924-1925) dan Al-Imtisal (sejak tahun 1927). Periode tahun 1930-an merupakan periode yang paling banyak penerbitannya. Bisa disebutkan sebagai berikut: Tjahja Islam (1930-1934), Al-Hidajatoel Islamijah (1931), Madjallah Atikan Ra'jat (1931), Al-Moe'min (1932-1939), Al-Mawaidz (1933-1936), Al-Moechtar (1933-1940), Al-Idhar (1934), Panggoegah Islam (1934), Al-Bajan (1934), Mitra (1934-1939), Al-Itisom (1935), Taufieg (1936), At-Taqwa (1936-1937), Falsafah Islamijah (1936-1937), Al-Islah (1937), Al-Bisjarah (1937), dan Madjalah Madzhab Ahli Soennah (1937). Sementara itu yang tak terlacak tahun terbitannya adalah Mifaaboes Sa'adah.

Memasuki periode 1940-an hingga tahun 1950-an, pers Islam berbahasa Sunda jumlahnya kian sedikit, hanya ada Batjaan Moerid (1940-1941) disusul majalah At-Taqwa yang terbit dari tahun 1949-1950. Majalah At-Taqwa kembali terbit setelah mengalami *vacum* dari tahun 1937. Kemudian yang terakhir dibuat adalah majalah Al-Muslih tahun 1952-1954.

Kurnia (*Sipatahoenan*, 15 Maret 1934) menyatakan

Kota Tasik geus kakotjap sapedah pabalatak Al-Alna: Al- Imtisal, Al-Moechtar, Al-Mansoer, Al-Mawaidz enz. Ajeuna geus rek poetjoenghoel deui soerat kabar Al-Idhar. Kaloearna di Tjiawi, dikamoedi koe Kiai Hatomi+H Mh Enoh. Bedjana ieu Al the aja dina panangtajoenganana pagoejoeban Idharoe biatil . . . enz.

Dari sekian surat kabar yang terbit di Tasikmalaya, Al-Imtisal, Al-Mawaidz, dan Al-Moechtar terbilang cukup terkenal dibandingkan majalah lainnya, dilihat dari konsistensi penerbitan dan keredaksian. Antusiasme masyarakat pembaca terbilang sangat tinggi, bahkan hingga menjadikan majalah tersebut sebagai referensi alternatif untuk mereka yang ingin belajar agama Islam. Dibuktikan dengan banyaknya surat-surat dari pembaca yang masuk ke meja redaksi dari berbagai daerah. Mereka mengirimkan beragam pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian ditampung dan dijawab langsung oleh para kyai atau ajengan yang selanjutnya dimuat dalam setiap penerbitannya berupa *waleran serat*.

Selain untuk berdakwah, majalah atau surat kabar sering dijadikan sebagai corong pemikiran para kyai di Tasikmalaya. Nasriah (2012: 166) menjelaskan mengenai peran serta fungsi berdakwah melalui surat kabar sebagai berikut

. . . surat kabar harus bersifat inovatif dengan senantiasa mendorong masyarakat agar selalu berpikir lebih maju dan gemar mengusahakan temuan-temuan baru yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun pemikiran-pemikiran orisinal masyarakat.

Majalah Al-Moechtar sekaligus menjadi tempat diskusi terbuka antara para ulama. Perkembangan surat kabar Islam berbahasa Sunda tersebut mencerminkan tingginya gairah intelektual muslim di Tasikmalaya yang turut mewarnai dinamika sosial keagamaan sepanjang paruh pertama abad ke-20.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Berikut beberapa hasil penelitian yang menurut penulis sangat relevan dengan tema skripsi adalah:

2.2.1 *Print Culture and Local Islamic Identity in West Java: Qur'anic Commentaries in Sundanese Islamic Magazines (1930-2015)*

Penelitian tersebut ditulis oleh Jajang A Rohmana dan Muhamad Zuldin dalam Jurnal Al-Tahrir, Vol. 18, No. 2 November 2018: 1-27, IAIN Ponorogo. Jurnal tersebut memfokuskan pada masalah konstruksi identitas Islam Sunda di Jawa Barat yang tercermin dalam rubrik tafsir Al-Qur'an di media cetak Sunda. Objeknya adalah enam majalah Sunda yang terbit antara tahun 1930-2015, yakni Tjahja Islam, Al-Imtisal, Al-Mawa'idz, Al-Moechtar, Iber dan Bina Da'wah. Relevansi jurnal tersebut dengan tema proposal penelitian adalah terdapat kesamaan mengenai media massa yang digunakan yakni berupa pers cetak. Persamaan lainnya terletak pada objek yang digunakan yakni majalah Islam berbahasa Sunda.

Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Jurnal karya Jajang A Rohmana dan Muhamad Zuldin memfokuskan pada identitas Islam

Sunda di Jawa Barat pada tahun 1930-2015 sedangkan penelitian tersebut berfokus pada perkembangan majalah Al-Moechtar sebagai media dakwah Islam di Tasikmalaya pada tahun 1933-1940.

2.2.2 Nasionalisme Ajengan Ruhiyat (Gagasan dan Praksis Nasionalisme Seorang Ulama)

Penelitian tersebut ditulis oleh Faisal Fadilla Noorikhshan dalam jurnal *Politika*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2016. Jurnal tersebut membahas mengenai perjuangan salah satu ulama lokal yang namanya kurang di lirik masyarakat yaitu KH. Ruhiyat atau Abah Ajengan Ruhiyat. Beliau adalah salah satu ulama penggagas gerakan nasionalisme di Indonesia dan memiliki jasa-jasa yang besar bagi kota Tasikmalaya.

Relevansi jurnal tersebut adalah adanya kesamaan mengenai kontribusi kyai atau ulama dalam gerakan nasionalisme di Indonesia. Gerakan kebangsaan tersebut tidak hanya di realisasikan dalam bentuk organisasi-organisasi keagamaan melainkan juga dengan turut aktif dalam media cetak lokal berbahasa Sunda sebagai bagian dari pemanfaatan media massa sebagai pelumas lancarnya jalan dakwah di Kota Tasikmalaya. Perbedaan nampak sangat jelas terletak dalam fokus penelitian yang diteliti. Jurnal karya Noorikhshan memfokuskan penelitiannya pada peran tokoh KH. Ruhiyat sedangkan penulis berfokus pada majalah Al-Moechtar.

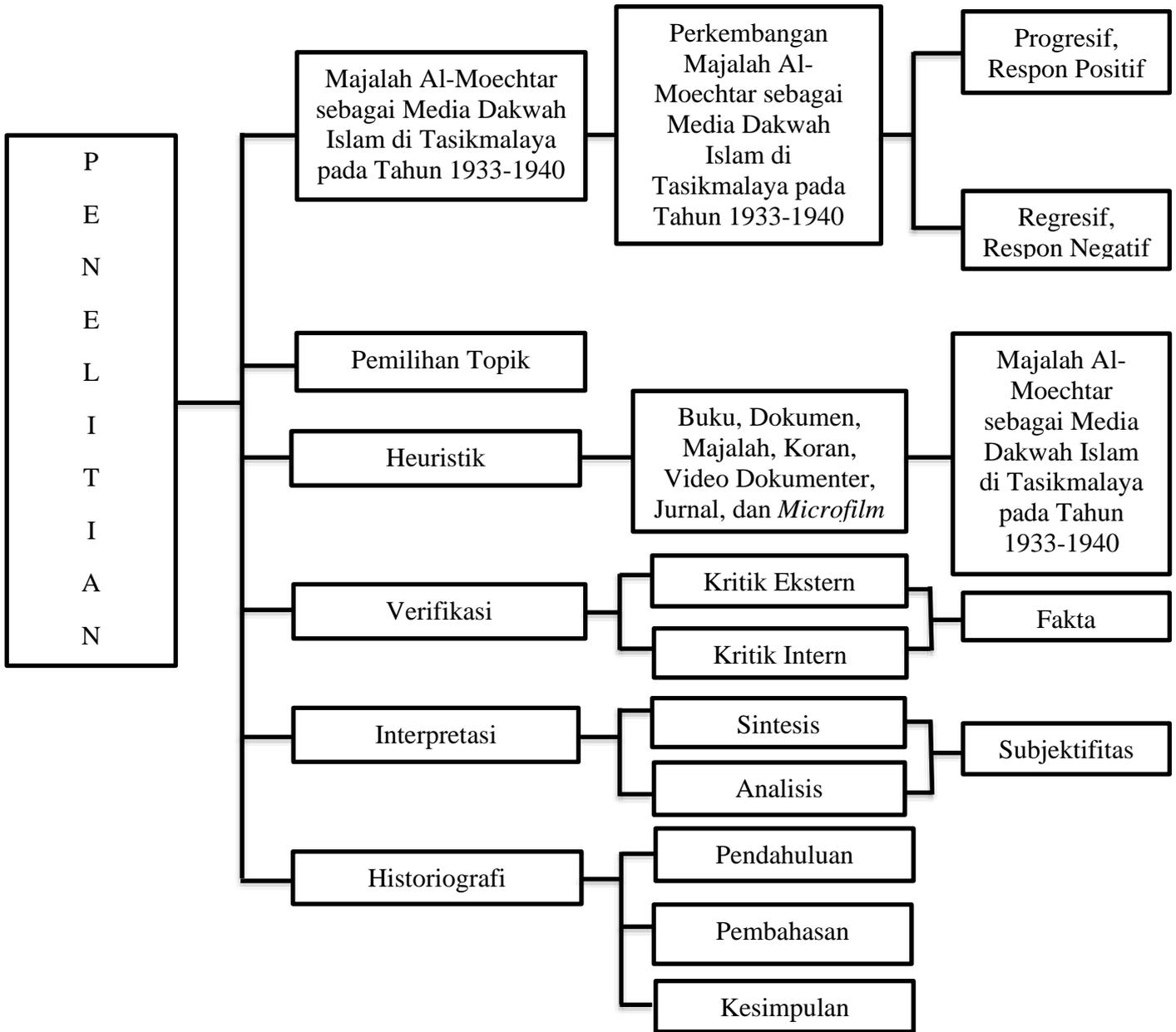
2.2.3 Surat Kabar Sebagai Media Dakwah, ditulis oleh ST. Nasriah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dan telah di unggah dalam *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1, Desember 2012: 161-176.

Relevansi jurnal karya Nasriah tersebut adalah sama-sama mengangkat surat kabar sebagai media yang di gunakan dalam berdakwah serta menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam. Perbedaan yang paling signifikan hanya terdapat dalam objek penelitiannya. Jurnal tersebut tidak membahas mengenai majalah Al-Moechtar dan tidak adanya batasan tahun.

2.3 Kerangka Konseptual

Guntara (2016: 15) menjelaskan definisi kerangka konseptual sebagai “Suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti”. Kerangka konseptual sangat berguna untuk menjelaskan secara gamblang tentang topik yang akan dibahas. Konsep yang akan diamati harus dijabarkan terlebih dahulu ke dalam bentuk variabel-variabel sehingga elemen pengukurannya dapat dirinci secara konkret.

Fungsi lain dari kerangka konseptual adalah untuk memudahkan penyusunan hipotesis, serta mempermudah identifikasi fungsi variabel penelitian. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu di kemukakan apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau bahkan lebih, apabila hanya terdiri dari satu variabel atau lebih secara mandiri maka perlu dilakukan deskripsi teoretis terhadap masing-masing variabel dengan argumentasi terhadap variasi besarnya variabel yang diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti akan menjabarkan kerangka konseptual terhadap penelitian yang berjudul “Majalah Al-Moechtar sebagai Media Dakwah Islam di Tasikmalaya pada Tahun 1933-1940” yang memfokuskan penelitiannya pada perkembangan majalah Al-Moechtar sebagai media dakwah Islam di Tasikmalaya pada tahun 1933-1940 dengan menggunakan metode penelitian historis (*historical method*) yang mengacu pada metode sejarah Kuntowijoyo. Berikut merupakan bagan kerangka konseptual penelitian yang digunakan oleh peneliti



2.4 Pertanyaan Penelitian

Senada dengan apa yang termaktub dalam rumusan masalah yakni: Bagaimana perkembangan majalah Al-Moechtar sebagai media dakwah Islam di Tasikmalaya pada tahun 1933-1940? Rumusan masalah tersebut kemudian diuraikan kembali dalam rangkaian pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 2.4.1 Bagaimana latar belakang diterbitkannya majalah Al-Moechtar?
- 2.4.2 Bagaimana isi majalah Al-Moechtar?
- 2.4.3 Bagaimana fungsi majalah Al-Moechtar sebagai media dakwah Islam di Tasikmalaya?